

PROFIL INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2016

I. KEDUDUKAN, DOMISILI DAN ALAMAT LENGKAP

Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun berkedudukan di jalan Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Gedung Gunung Sugie Lantai II Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Meral Kabupaten Karimun. Nomor telepon dan fax kantor 0777-7366060, alamat *email* itda_karimun@yahoo.com.

II. VISI DAN MISI

A. VISI

Visi merupakan gambaran tentang masa depan (*future*) yang realistis atas cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif, dan motivatif yang akan diwujudkan dalam kurun waktu tertentu.

Visi sebagai suatu keadaan dan karakteristik yang ingin dicapai pada masa yang akan datang dengan melalui suatu proses dan sistem yang terstandarisasi akan memacu suatu lembaga atau institusi untuk mencapai kondisi ideal yang diinginkan. Kondisi ideal yang diinginkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016. Sebagai bagian integral dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, maka perwujudan Visi dan Misi Inspektorat diselaraskan dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah, dimana Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun adalah:

**“MENJADI INSTITUSI PENGAWASAN YANG PROFESIONAL
SEBAGAI KATALISATOR PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE”.**

Penjelasan Visi:

Visi Inspektorat Daerah mengandung 3 (tiga) hal pokok yang menjadi kunci yakni:

1. INSTITUSI PENGAWASAN

Mengandung makna bahwa Inspektorat adalah Institusi pengawasan Internal Pemerintah Kabupaten Karimun yang secara sadar dan patuh pada standard dan etika profesi dan meyakini bahwa keberadaannya lebih kepada upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dan penerapan Sistem Pengendalian Manajemen guna mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Karimun.

2. BERKUALITAS DAN PROFESIONAL

Setiap aparat pengawas akan selalu meningkatkan kapabilitasnya sehingga memiliki Core Competency dan setiap pelaksanaan tugas Inspektorat senantiasa melakukan dengan suatu landasan metodologi, sikap kerja yang berintegritas secara moral dan professional dan senantiasa berorientasi kepada penciptaan nilai tambah bagi satuan kerja/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.

3. KATALISATOR PERWUJUDAN *GOOD GOVERNANCE*

Maknanya bahwa Inspektorat memiliki kewajiban moral sebagai Aparat pengawasan Internal Pemerintah Kabupaten Karimun untuk berada pada *front line* perwujudan *good governance* dengan bersikap proaktif dan terpercaya dalam mentransformasikan manajemen pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Pelaksanaan pengawasan fungsional memperhatikan prinsip prinsip *accountability, effectiveness dan eficiency, responsiveness serta transparency.*

B. MISI

Untuk meningkatkan intensitas kegiatan pengawasan dan pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas kerja dan manajemen aparatur pemerintah di daerah, maka untuk mencapai visi yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun dijabarkan ke dalam misi yang merupakan pernyataan untuk menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Adapun Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun sebagai berikut :

- 1. Mendorong peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan terwujudnya iklim yang mencegah KKN di Lingkungan Pemda Kabupaten Karimun*
- 2. Meningkatkan kinerja pengawasan yang profesional di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun*

III. TUJUAN DAN SASARAN

A. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan target kualitatif yang dalam penetapannya mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki.

Untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi, Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun mengelompokkan atas 2 (dua) tujuan untuk periode 2011-2016:

1. *Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, professional dan akuntabel;*
2. *Meningkatkan Peran Inspektorat Daerah sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pengawasan.*

B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu, yang merupakan penjabaran dari tujuan.

Dalam penetapan sasaran juga dirancang dan diidentifikasi indikator pencapaiannya, yaitu suatu ukuran tingkat keberhasilanperwujudan pencapaiannya pada periode tahun tertentu.Setiap indikator pencapaian sasaran disertai dengan targetnya masing-masing.

Dalam menentukan sasaran dan indikator sasaran,tetap mengacu pada sasaran dan indikator sasaran Pemerintah Kabupaten Karimun.*adapun Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun, adalah sebagai berikut:*

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SASARAN
1.	1. Persentase Penyelewengan dan penyalahgunaan kewenangan dari total nilai APBD sekitar 1,5% pertahun. 2. Menurunnya angka kewajiban setor kepada Negara dengan tidak lebih dari Rp.200.000.000,- 3. Persentase Pejabat yang membuat LHKPN 4. Persentase SPKD yang telah melaksanakan SPIP.	<i><u>Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dari unsur KKN</u></i>

2.	1. Persentase LAKIP SKPD sesuai dengan SAKIP pertahun 2. Persentase SKPD yang IKUnya relevan dengan sasaran yang akan dicapai pertahun 3. Persentase SKPD yang akuntabilitasnya baik yaitu persentase SKPD yang dari hasil evaluasi mendapatkan nilai > 50.	<p><u><i>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja</i></u></p> <p><u><i>Unit Kerja</i></u></p>
3.	1. Persentase Pengawas yang sudah bersertifikasi JFA. 2. Persentase pegawai yang kompeten melakukan evaluasi AKIP. 3. Persentase pegawai yang menguasai SPIP.	<p><u><i>Meningkatnya Kompetensi SDM Inspektorat</i></u></p>
4.	1. Jumlah Hasil Laporan Pemeriksaan Tepat Waktu pertahun. 2. Persentase Pemeriksaan yang dilaksanakan sesuai dengan Perencanaan. 3. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dalam periode tertentu	<p><u><i>Meningkatnya Kualitas tugas pokok dan fungsi</i></u></p>

IV. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. STRATEGI

Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu yang meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan operasional.

Dengan melandaskan pemikiran dan kerangka kerja yang dihasilkan oleh analisa SWOT melalui indentifikasi Analisa Lingkungan Internal (ALI) dan Analisa Lingkungan Eksternal (ALE) di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten karimun maka pilihan untuk memprioritaskan pelaksanaan strategi dan program kerja berdasarkan analisa strategi kekuatan (Strengths) + Peluang (Opportunity) diprioritaskan strategi – strategi sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan fungsi sumber daya manusia yang ada;
2. Memaksimalkan fungsi pengawasan;
3. Mensosialisasikan program dan hasil pengawasan;
4. Mengoptimalkan penggunaan anggaran pengawasan.

B. KEBIJAKAN

Kebijakan merupakan ketentuan – ketentuan yang ditetapkan oleh berwenang untuk pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program atau kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi, visi organisasi.

Adapun kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja pemerintah;
2. Penerapan prinsip – prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) pada semua tingkatan dan lini pemerintahan pada semua kegiatan;
3. Peningkatan kinerja dan mutu layanan disemua aspek layanan “*public service*”;
4. Tertib administrasi pemerintahan.

V. ISU DAN MASALAH STRATEGIS

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Inspektorat, maka dapat dirumuskan isu – isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat.

Perumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Inspektorat. Isu – isu ini harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa yang akan datang.

A. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun mempunyai peran besar dalam mewujudkan *good governance and clean government* pada Pemerintah Kabupaten Karimun. Hal ini bukanlah sesuatu yang mudah karena terdapat berbagai permasalahan yang ada dan sering mengemuka, baik dari dalam institusi Inspektorat secara khusus maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun secara umum.

Permasalahan - permasalahan tersebut antara lain, masih sering terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan tugas oleh aparatur sebagai akibat dari rendahnya pengetahuan akan peraturan perundangan yang berlaku, masih rendahnya komitmen dan kerjasama dari pimpinan SKPD dalam menindaklanjuti setiap temuan hasil pemeriksaan, serta masih terbatasnya kuantitas dan kualitas aparatur pengawasan jika dibandingkan dengan jumlah dan luasnya obyek pemeriksaan.

Untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan pemerintahan yang baik, maka dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun telah menetapkan suatu perencanaan strategis (RENSTRA) yang berisi Visi, Misi, strategi, program dan kegiatan yang merupakan hasil pengintegrasian semua sumber daya yang ada, sebagai acuan ke depan untuk menjawab atas permasalahan dan tanggung jawab yang dihadapi.

B. Penentuan Isu – isu Strategis

Inspektorat Daerah yang merupakan salah satu komponen dari Pemerintah Kabupaten Karimun turut serta dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Secara umum keadaan yang digambarkan di atas sangat perlu diadakan perubahan menuju keadaan yang lebih ideal,

guna mewujudkan *good governance* dimana Inspektorat sebagai institusi yang menjalankan fungsi *controlling* diharapkan menjadi katalisator perwujudan *good governance*.

Beberapa penentuan isu - isu strategis dan masalah mendesak yang senantiasa menjadi fokus perhatian dalam penentuan prioritas program dan kegiatan pembangunan bagi Pemerintah Kabupaten Karimun terutama di bidang pengawasan.

Isu – isu strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun tahun 2011 – 2016, sebagai berikut:

- **Internal**

Inspektorat harus berbenah diribai secara struktural fungsional organisatoris maupun secara kultural. Pengembangan SDM Aparat Pengawasan harus diproyeksikan dalam pengetahuan umum (*general knowledge*), teknis spesifik (*technical knowledge*), pengorganisasian tugas/pekerjaan (*Job Organizing*), wawasan administrasi (*administrative concept*), serta kemauan untuk selalu melakukan pengenalan diri (*self knowledge*). Dengan demikian diharapkan akan memperoleh SDM Aparat Pengawasan yang memiliki kualitas dan profesional. Berkaitan dengan teknis spesifik (*technical knowledge*), maka tenaga Fungsional Auditor memiliki posisi strategis dalam pelaksanaan fungsi audit. Untuk itu Pengembangan Tenaga Fungsional Auditor baik dari segi kualitas maupun kuantitas perlu diprioritaskan sehingga pada waktunya nanti pengorganisasian tugas/pekerjaan (*Job Organizing*) menjadi lebih jelas dan terarah.

- **Eksternal**

Kinerja Pemerintahan masih perlu ditingkatkan dan masih lemahnya pengendalian intern dari masing – masing unit kerja. Adapun hambatan

(faktor eksternal) yang dihadapi yaitu, kelembagaan pelaksanaan urusan pemerintahan belum didukung Standar Pelayanan Minimal (SPM), kualitas dan kuantitas aparatur belum didasarkan pada muatan kompetensi yang memadai, Koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah masih perlu ditingkatkan. Dalam upaya meningkatkan Kinerja Pemerintah bagi setiap unit kerja / organisasi pemerintah daerah secara efisien dan efektif, maka di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun perlu diberlakukan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008. SPIP sejatinya adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam rangka itu Inspektorat Kabupaten Karimun sebagai aparat pengawasan internal berfungsi mendorong pelaksanaan SPIP pada setiap unit kerja melalui kegiatan.

C. Tinjauan Atas RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2011 - 2016

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016 menjadi landasan dalam penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016. Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah harus sinergis dan searah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang tertuang dalam visi, misi dan arah kebijakan RPJMD diukur dalam masa 5 (lima) tahun kedepan.

Visi pembangunan Kabupaten Karimun untuk jangka waktu 2011 – 2016 adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Kabupaten Karimun yang Maju dan Berdaya Saing Berlandaskan Iman dan Taqwa”.

Secara konseptual visi pembangunan Kabupaten Karimun tahun 2011 – 2016, mengarah pada mendukung tujuan pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2010 – 2014.

“Maju dan Berdaya saing” diartikan sebagai Kabupaten Karimun yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, kreatif, produktif dan inovatif yang ditandai dengan meningkatnya kegiatan investasi, membaiknya infrastruktur dasar, berkembangnya pengelolaan sumber daya lokal secara optimal, meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk pendidikan dan kesehatan, serta meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

“berlandaskan Iman dan Taqwa diartikan sebagai Kabupaten yang meletakkan nilai – nilai agama sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Landasan nilai – nilai agama ini tercermin dari sikap dan perilaku masyarakat yang berakhlak mulia, suasana kehidupan yang agamis, dan kehidupan antar umat beragama yang harmonis. Kesemua hal tersebut didukung oleh pendidikan dan keagamaan (formal dan nonformal) secara sistematis dan menyeluruh sehingga dapat membentuk masyarakat yang cerdas dan berkualitas.

VI. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. TUGAS POKOK

Inspektorat Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

B. FUNGSI

Untuk menunjang pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut di atas, maka Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan program pengawasan;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
4. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Inspektorat;
5. Sesuai dengan paradigma baru peran aparat pengawasan intern, Inspektorat juga berfungsi sebagai quality assurance dan pemberi jasa konsultasi kepada unit – unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.

VII. STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Pemerintah Daerah, institusi pengawasan Kabupaten Karimun telah mengalami perubahan Nomenklatur dari BAWASDA menjadi Inspektorat yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2008 yang memberikan implikasi kepada Struktur Organisasi Inspektorat Karimun dimana jabatan Inspektur Pembantu Wilayah yang berada di bawah Inspektur adalah Jabatan dengan Eselon IIIa.

Peraturan Bupati Karimun Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun menjelaskan bahwa: Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun dipimpin oleh 1 (satu) orang Inspektur yang membawahi 1 (satu) orang Sekretaris, 4 (empat) orang Inspektur Pembantu yakni Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III dan Inspektur Pembantu Wilayah IV serta Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretaris Inspektorat membawahi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, masing - masing Inspektur Pembantu

membawahi Kepala Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan, Kepala Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan, dan Kepala Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. Pada akhir tahun 2014, masih terdapat 1 (satu) jabatan Kepala Seksi yang belum terisi, yaitu, Kasi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Pada Inspektur Pembantu Wilayah III. Struktur organisasi dan personalia Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun dapat terlihat dalam gambar 1.1. (terlampir)

VII. GAMBARAN UMUM TENTANG ORGANISASI

Struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun terdiri dari Inspektur dibantu oleh satu Sekretaris, empat Inspektur Pembantu Wilayah, dua Kepala Sub-Bagian dan 12 Kepala Seksi Pengawas Pemerintah.

Secara garis besar pelaksanaan tugas pokok masing-masing bagian/bidang adalah sebagai berikut :

- 1. Sekretariat, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah;
- 2. Para Inspektur Pembantu Wilayah/Bidang I,II,III dan IV mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan pengawasan terhadap seluruh kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

IX. PROFIL SINGKAT PIMPINAN

A. BIODATA PIMPINAN

Nama	: Dedi Hardiman, SE
Tempat / Tanggal Lahir	: Kolok Mudik / 10 Oktober 1961
Agama	: Islam
Golongan Ruang	: IV/b, Pembina Tingkat I

Pendidikan Terakhir : S-1 Akuntansi

Jenis Pegawai : PNS Pusat DPK pada Pemerintah
Kabupaten / Kota

Alamat Rumah : Jalan Teluk Air RT 007/RW 003 Kelurahan
Teluk Air kecamatan Karimun

Jabatan Terakhir / TMT : Inspektur / 01 Oktober 2008

B. RIWAYAT JABATAN

1. Auditor Pertama, TMT 02 Oktober 1996
2. Auditor Muda, TMT 10 Maret 2005
3. Auditor Madya, TMT 01 Oktober 2008
4. Inspektur Daerah Kabupaten Karimun, TMT 12 September 2013

X. PROGRAM DAN KEGIATAN

A. PROGRAM

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terintegral yang dilaksanakan oleh organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui kebijakan organisasi. kebijakan organisasi tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk program yang terangkum dalam uraian sebagai berikut :

1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Program ini ditujukan guna peningkatan kualitas pengawasan Aparat Pengawasan Fungsional Internal Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

2. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan

Program ini ditujukan guna peningkatan kualitas pengawasan Aparat Pengawasan Fungsional Internal Pemerintah Daerah dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintahan daerah.

3. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumberdaya Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah.

4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur di unit kerja.

6. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas disiplin aparat di masing – masing unit kerja.

B. KEGIATAN

Kegiatan merupakan tindakan nyata Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun dalam jangka waktu tertentu yang dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis organisasi. Beberapa **Rencana Kerja Program Tahunan (RKPT 2011 - 2016)** Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut :

1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

- a. Pelaksanaan pemeriksaan regular;

- b. Rapat Koordinasi Pengawasan (RAKORWAS) dalam rangka Peningkatan Mutu Hasil Pengawasan dan Pemuktahiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Pembahasan PKPT;
- c. Monitoring Tidaklanjut Hasil Pemeriksaan eksternal dan Internal;
- d. Review Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan Pemkab. Karimun;
- e. Gelar Pengawasan Daerah;
- f. Pemantauan Penyelenggaran SPIP;
- g. Penyelenggaraan Forum Penataan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Pemkab. Karimun;
- h. Evaluasi LAKIP SKPD di lingkungan Pemkab. Karimun;
- i. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- j. Penyediaan Sistem Informasi Manajemen hasil Pemeriksaan (SIMHP)
- k. TindakLanjut Percepatan Penyelesaian Kerugian Daerah;
- l. Fasilitas Pengisian dan Penyampaian LHKPN Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2014;
- m. Sistem Informasi dan Pelaporan Kinerja SKPD;
- n. Pemeriksaan Fisik Kas SKPD dalam rangka penutupan tahun anggaran;
- o. Monitorring Proyek Pembangunan Kab. Karimun;
- p. Monev Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Sosialisasi Anti korupsi;
- q. Audit Operasional Penerimaan Daerah
- r. Peningkatan Pemahaman Proses Hukum Kasus Indikasi TPK;
- s. Reviu RKA SKPD.

2. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan.

- a. Review Laporan Keuangan daerah Kabupaten Karimun;
- b. Penyusunan LAKIP Kabupaten Karimun;

- c. Penyusunan LAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun.
- 3. **Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan**
 - a. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja;
 - b. Pelatihan penjenjangan aparatur pengawasan;
 - c. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa & aparatur pengawasan;
 - d. Penyusunan Pedoman Pengawasan / Kebijakan Pedoman Teknis di bidang pengawasan.
- 4. **Program Perencanaan Pembangunan Daerah**
 - a. Penyusunan Renja;
 - b. Sosialisasi dan Publikasi Kegiatan SKPD melalui Pameran.
- 5. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
 - a. Pengadaan Mebeleur;
 - b. Pengadaan PereInγκapan dan Peralatan Kantor.

Program dan kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dijelaskan di atas diharapkan dapat menjawab tantangan dan tanggung jawab Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun yang harus selalu berada pada *front line* serta katalisator penerapan *good governance* di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.

Dibawah ini, disajikan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun dengan target kinerja yang akan dicapai setiap tahunnya.

TABEL 5.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
YANG MENDUKUNG SASARAN

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dari unsur KKN	- Persentase Pengembalian kerugian daerah ke kas daerah	15%	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH	Fasilitasi Pengisian dan Penyampaian LHKPN Pemerintah Kabupaten Karimun
	- Opini BPK terhadap LKPD	WTP		Penyediaan Sistem Informasi manajemen Hasil Pemeriksaan
	- Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	90%		Tindaklanjut Percepatan Penyelesaian Kerugian Daerah
	- Persentase Pejabat Negara dab PNS di lingkungan Pemkab yang melaporkan LHKPN	90%		Intensifikasi dan monitoring penyampian LHKPN Kab. Karimun
				Monitoring Tindaklanjut Hail Pemeriksaan eksternal dan Internal
				Peningkatan Pemahaman Proses Hukum Kasus Indikasi TPK
				Monitoring dan Pemantauan Tindaklanjut Haasil Audit berdasarkan aplikasi SIM HP
				Rapat Koordinasi Pengawasan (RAKORWAS) dalam rangka peningkatan mutu hasil pengawasan dan Pembahasan PKPT
				Gelar Pengawasan
				Pemeriksaan Fisik Kas SKPD dalam rangka penutupan tahun anggaran
Meningkatnya akuntabilitas kinerja unit kerja	- Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemda	>70	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH	Reviu RKA SKPD
	- Jumlah SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori “B”	20 UK		Penyelenggaraan Forum Penataan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemkab. Karimun
				Evaluasi LAKIP SKPD di lingkugan Pemkab Karimun
				Sistem Informasi Laporan Kinerja SKPD
				Reviu Laporan Kinerja Pemda Karimun
			Peningkatan	Reviu Laporan Keuangan

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN
			Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Daerah Kabupaten Karimun
			Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan LAKIP Kabupaen Karimun
				Penyusunan LAKIP Inspektorat Daerah
				Penyusunan Renja Inspektorat
Terciptanya Reformasi Birokrasi di Bidang Pengawasan	- Jumlah SKPD yang telah menerapkan SPIP di lingkungan kerjanya	15 UK	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH	Pemantauan Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemkab. Karimun
	- Persentase pegawai Inspektorat yang menguasai SPIP.	35%		Penilaian Mandiri Pelaksanan Reformasi Birokrasi
				Implementasi, Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Reformasi di Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan
Meningkatnya kualitas tugas pokok dan fungsi	- Persentse penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan tepat waktu	90%	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH	Pemeriksaan Reguler di lingkungan Pemkab. Karimun sesuai dengan PKPT
	- Persentase Pemeriksaan Yang Dilaksanakan Sesuai dengan Perencanaan	90%		Reviu Pengadaan Barang dan JAse Di lingkungan Pemkab. KARimun Tahun 2016
				Audit Operasional Penerimaan Daerah
				Monitoring Proyek Pembangunan Kab. Karimun
			Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Pelatihan penjenjangan aparatur pengawasan
				Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa & aparatur pengawasan.
				Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja.
				Pembuatan Buku Saku Auditor
				Penyusunan Pedoman Pengawasan / Kebijakan Pedoman Teknis di bidang Pengawasan
			Perencaaan Pembangunan Daerah	Sosialisasi dan Publikasi Kegiatan SKPD melalui Pameran
			Peningkatan	Pengadaan Meubelair

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN
			Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Perlengkapn Kantor
			Peningkatan Disiplin Apartur	Penadaan Pakian Dinas beserta perlengkapnnya
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayan Administrasi umum dan Perkantoran

Beberapa Gambar dari kegiatan - kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun, antara lain :

- ❖ Kegiatan Sistem Informasi dan Pelaporan Kinerja SKPD Tahun 2016







❖ Kegiatan Pemeriksaan Reguler





❖ Kegiatan Audit Tujuan Tertentu Pelaksanaan Nilai Sisa Kontrak/SPK
Tahun 2015





Demikian profil ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Balai Karimun, Desember 2016

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KARIMUN



DEDI HARDIMAN, SE

Pembina Tk. I

NIP. 19611010 199303 1 010